



# EFFORT TO SUPPRESS SEA ROBBERY IN INDONESIAN WATERS

**Nautical Forum, Singapore**  
**17 January 2023**



# Outline

- ❑ Background
- ❑ Maritime Security Issues in Indonesia & Southeast Asia
- ❑ Incident Data Comparison & Analysis
- ❑ Indonesia's Effort to Enhance Maritime Security
- ❑ Regional Collaboration
- ❑ Way Forward



# Background

## SE ASIA

High reserves of natural resources

Population almost 700 million

Geopolitical Gravity in Indo-Pacific

Important maritime routes for global seaborne trade



## INDONESIA

Archipelagic Country that borders with 10 countries in the region

40% of sea borne trade passes through Malacca Strait, 1/3 of global trade passes through the South China Sea

The Government's vision is to become the World Maritime Fulcrum, the sea is the main route for increasing connectivity



# Background



## Maritime Traffic Density in SE Asia and Indonesia







# Marsec Issues in Indonesia & Region

## Maritime Security Issues in Indonesia and the region

- Drug Trafficking (Golden Triangle and Golden Crescent)
- IUU Fishing
- Irregular Migration
- TOC (Smuggling, Sea Robbery, Human Trafficking)
- Border Dispute
- Oil Spill



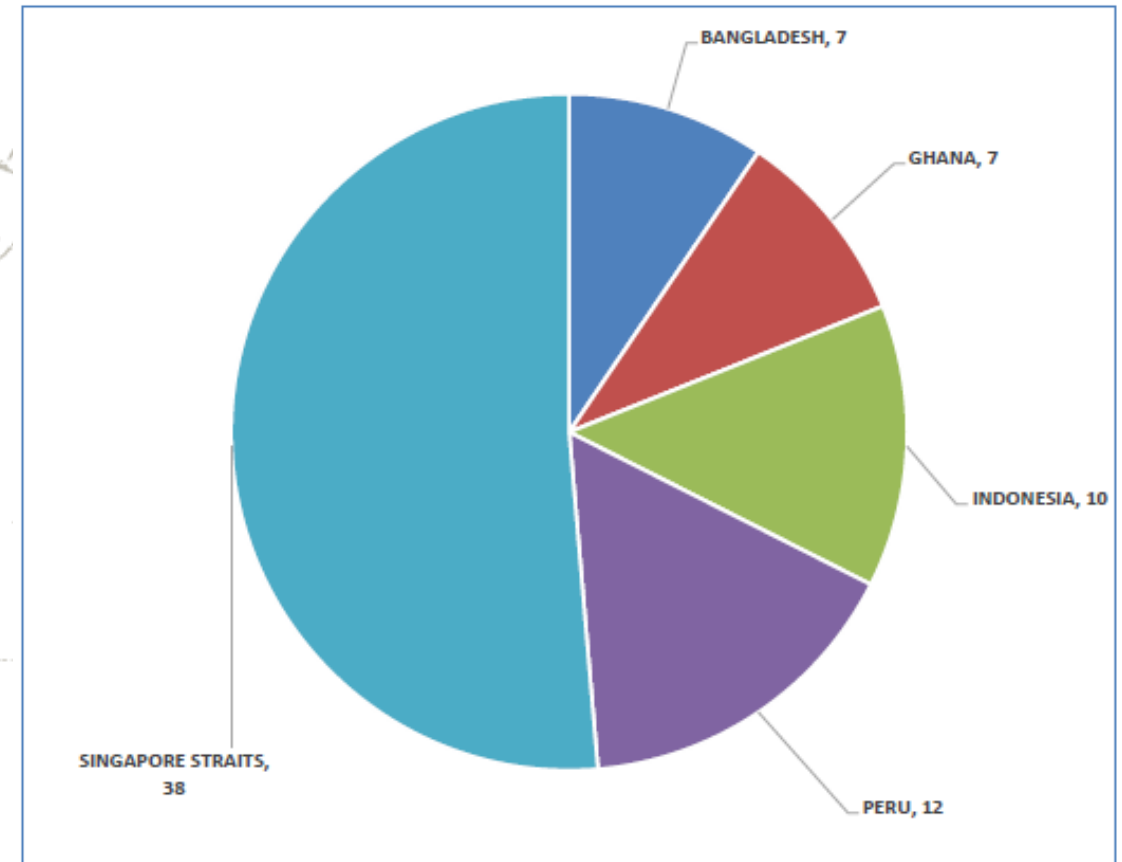


# Incidents Data Comparison & Analysis

## IMB Data

TABLE 1: Locations of ACTUAL and ATTEMPTED incidents, January – December 2018 – 2022

	Location	2018	2019	2020	2021	2022
S E ASIA	Indonesia	36	25	26	9	10
	Malacca Straits				1	
	Malaysia	11	11	4	2	4
	Philippines	10	5	8	9	6
	Singapore Straits	3	12	23	35	38
	Thailand			1		

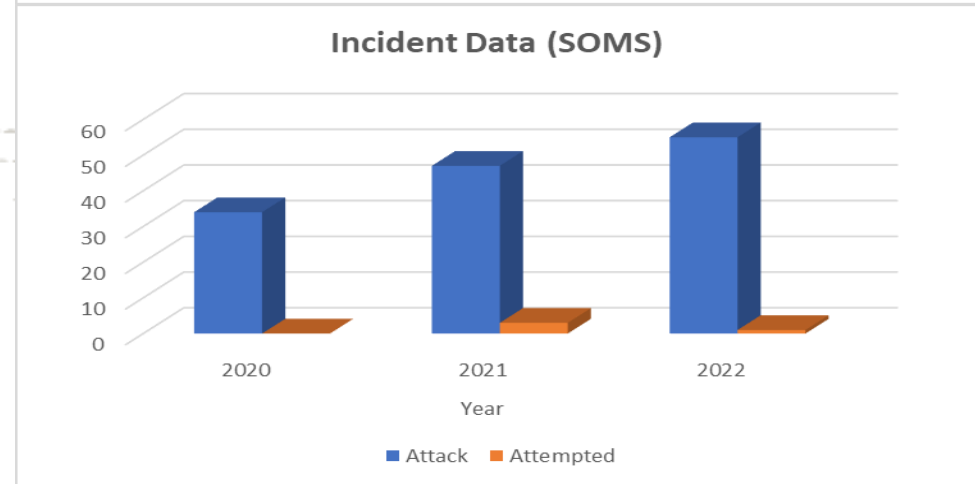
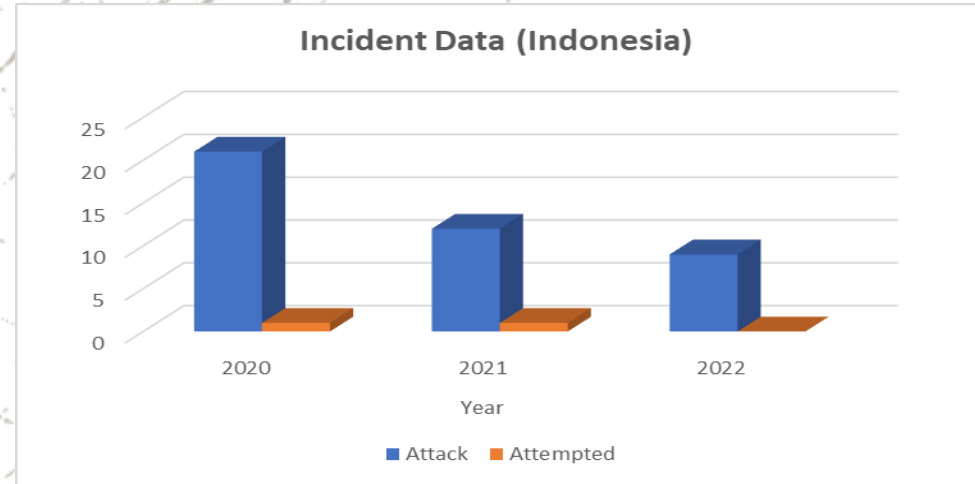
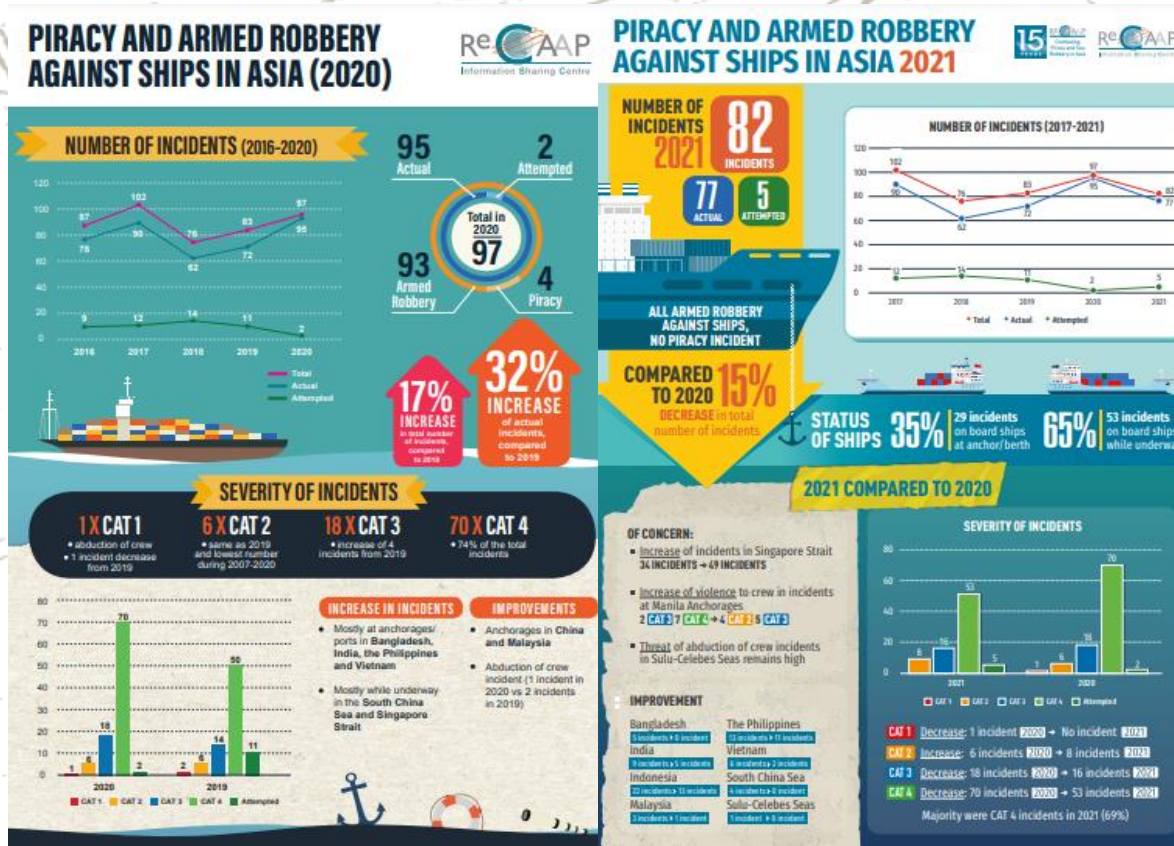






# Incidents Data Comparison & Analysis

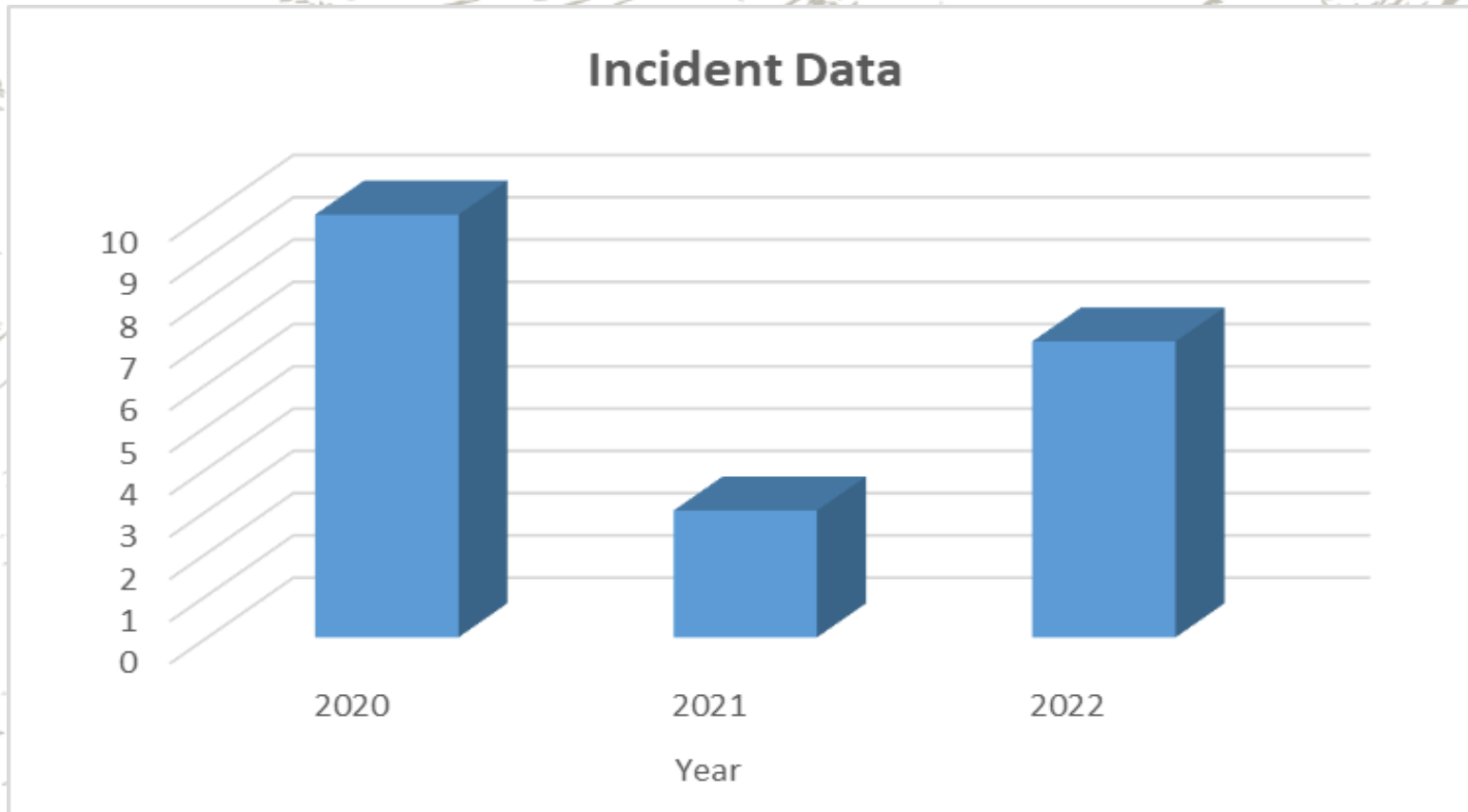
## ReCAAP Data





# Incidents Data Comparison & Analysis

## Bakamla's Data



- ❑ Most of incident were petty theft
- ❑ Most of perpetrators were not armed
- ❑ Hit and run, most were not successful attack (nothing stolen)





# Incidents Data Comparison & Analysis

## Analysis:

1. Divergence of data between the Reporting Center and Maritime Law Enforcement Agency (MLEA) because:
  - Reluctancy to report to MLEA – MLEA need timely report for quick responds
  - Misreported (may be)
2. Most of the incidents were low level incidents (petty theft). There is no Piracy reported in 2020-2022
3. In Indonesia, generally happens in anchorage area, while in SOMS happens when the ships were steaming
4. Mostly the perpetrators using only knives or not armed at all
5. The number of incidents significantly drop since 2015



# Indonesia's Effort to Enhance Marsec

## Government Regulation No. 13 Year 2022 on Enforcement of Security, Safety and Law Enforcement Indonesia's Waters and Indonesia's Jurisdiction.

- Bakamla as the Coordinator for Maritime Security, Safety dan Law Enforcement Cooperation Forum (Art. 4 b).
- Mandated to construct national policy for Maritime Security, Safety, and Law Enforcement.
- Maritime Patrol (Joint Patrol, Sectoral Patrol, and Coordinated Patrol)
- Search and Rescue
- Law Enforcement
- National Maritime Security and Safety Information System
- Monitoring and Evaluation.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM  
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna menjaga kedaulatan negara, kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyinergian tugas dan fungsi dari beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjalankan Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

SK No 133908 A





# Indonesia's Effort to Enhance Marsec



SALINAN

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK  
INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PATROLI NASIONAL TAHUN 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774);  
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);



## Coordinating Minister for Politics, Law, and Security Decree No. 74 Year 2022 on National Patrol Plan

- ❑ Served as National Plan for Maritime Security and Safety Patrol
- ❑ Put Emphasis on Joint Patrol and synchronize the sectoral patrol
- ❑ 17 Patrol Ships from all maritime law enforcement agency participate.





# Indonesia's Effort to Enhance Marsec



KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 225 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM KERJA PUSAT INFORMASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

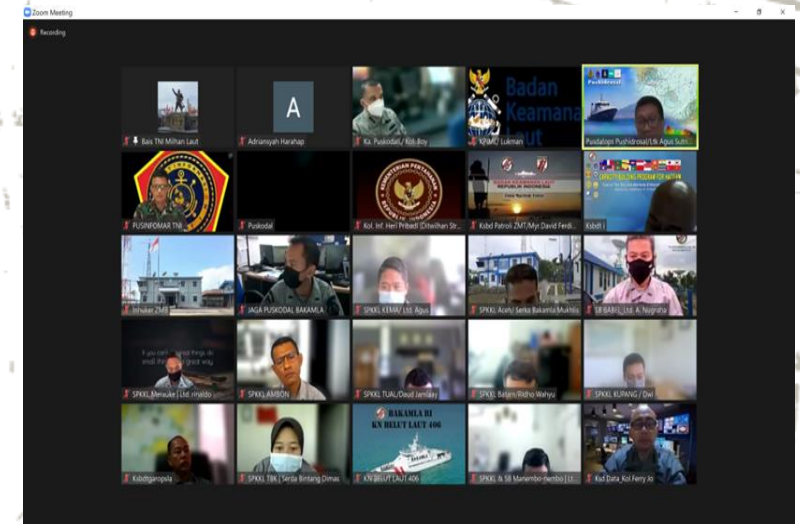
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Tim Kerja Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774);
  3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
  4. Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi

## Head of Indonesian Coast Guard (Bakamla) Decree No. 22 Year 2022 on Maritime Security and Safety Information Centre Task Force

- ❑ Legal basis for the LO from related maritime agencies to work in Maritime Security and Safety Information Centre in Bakamla.

We also conduct daily brief that attended virtually by 14 maritime agencies.







# Indonesia's Effort to Enhance Marsec



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK  
INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG

FORUM KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI  
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara



## Coordinating Minister for Politics, Law, and Security Decree No. 55 Year 2022 on Maritime Security, Safety, and Law Enforcement Forum

- ❑ As legal basis for monitoring and evaluating the management of maritime security, safety, and law enforcement.
- ❑ Led by Coordinating Minister for Politics, Law, and Security and the members are 12 Ministers or Head of Agencies
- ❑ Head of Indonesian Coast Guard serve as Secretary of the Forum





# Indonesia's Effort to Enhance Marsec



- 24/7 Contact Center
- Integrated with the Maritime Security and Safety Information Center and Bakamla's Command Center
- Toll Free Number, Whatsapp, SMS, and Email





# Indonesia's Effort to Enhance Marsec



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
  - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengaturlah keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

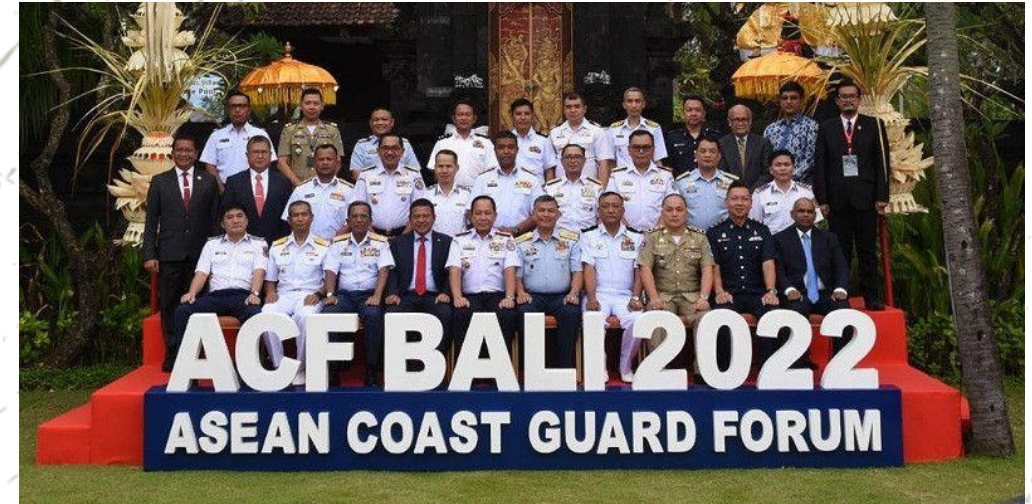
d. bahwa ...

- ❑ Indonesia has just revised its Penal Code with the Enactment of Law No. 1 Year 2023
- ❑ The Law aligning the terminology of Piracy with UNCLOS 1982
- ❑ As for act of violence for private ends in Indonesian Waters and Jurisdiction, the Law define the act as thievery.



# Regional Collaboration

- ❑ ASEAN Coast Guard and MLE convened the 1<sup>st</sup> ASEAN CG Forum Meeting In Bali.
- ❑ Purpose of the Forum are to enhance collaboration among Maritime Law Enforcement at Sea in ASEAN.
- ❑ The meeting produce a Declaration and a Joint Statement that highlight the importance of cooperation and collaboration among CG and MLEA in ASEAN.
- ❑ Activities of the forum in 2023 including but not limited to: information sharing, capacity building, confidence building activities, operational cooperation, and regular meeting.
- ❑ All participants of the Meeting also agreed to put all effort to formalize the Forum under ASEAN umbrella







# Regional Collaboration

## The 1<sup>st</sup> ASEAN CG Monthly Briefing

- ❑ Conducted on 12<sup>th</sup> January 2023
- ❑ Attended by 5 ASEAN Member States
- ❑ Discuss on modalities and terms of references for Information Sharing







# Regional Collaboration



Coordinating  
Patrol Optima  
Malindo at  
Malaysia

Updating  
Agreement  
JICA 2022

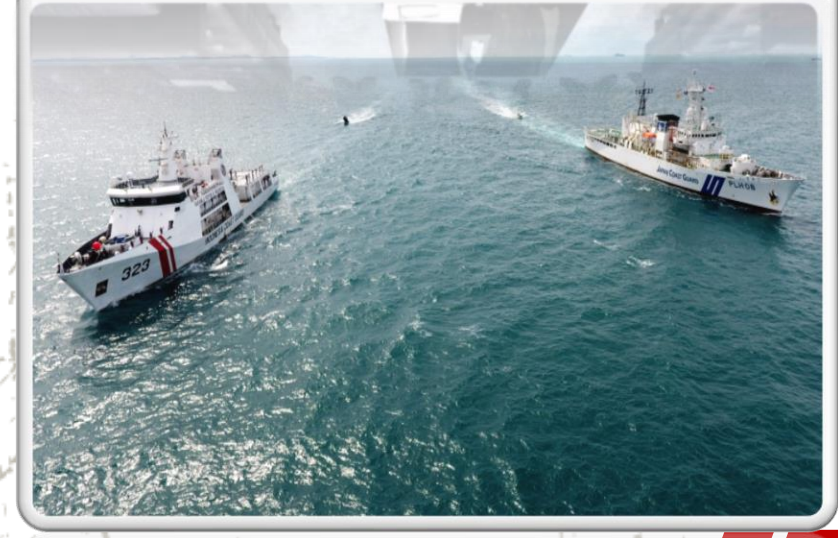


VBSS Training  
Course – UNODC  
at Batam



Port Visit to Johor 2022

Passing Exercise  
with Japan Coast  
Guard







# Way Forward

1. Encourage direct communication between ships and law enforcement agencies in order to fasten the respond toward an incident;
2. Intensify joint patrol between Indonesia's MLEA and coordinated patrol with neighboring countries as mandated by Govt Regulation No. 13 Year 2022;
3. Intensify interaction and exchange of information between coast guard and MLEA in ASEAN;
4. Encourage the formal establishment of ASEAN Coast Guard Forum as the Platform for cooperation among coast guard and MLEA in ASEAN; and
5. Maximize bilateral and the regional maritime security cooperation.

THANK YOU

*“None of Us is As Good As All of Us”*